



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 03 Juni 2023

Halaman: 2

► SISTEM PENDIDIKAN

Pengganti ASPD Tidak untuk Indikator PPDB

JOGJA—Ombudsman RI Perwakilan (ORI) DIY meminta pengganti asesmen standarisasi pendidikan daerah (ASPD) tak dijadikan indikator Penilaian penerimaan peserta didik baru (PPDB). Permintaan ORI DIY itu agar ASPD tidak membebani siswa dengan ujian-ujian yang tak perlu.

ORI DIY menambai baik permintaan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadliem Makarim untuk menghapus ASPD.

"Kembalikan ke fungsi pendidikan sebagai layanan publik, prinsipnya harus memudahkan. Jika ASPD menjadi instrumen yang justru menambah beban pelajar, sehingga tidak memudahkan pelajar, apalagi tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi, saya sependapat bahwa ASPD perlu dievaluasi," jelas Kepala ORI DIY Budhi Masturi, Jumat (2/6).

Budhi menyebut ASPD memang tidak mempengaruhi kelulusan siswa dan tidak bersifat wajib. "ASPD ini memang tidak mempengaruhi kelulusan, tapi dia diperhitungkan dalam PPDB, sehingga tetap menjadi tekanan psikologis bagi pelajar. Padahal jika dibandingkan dengan UN, duh UN diadakan itu salah satunya untuk menghilangkan tekanan psikologis pelajar," ujarnya.

Wacana pengganti ASPD oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY untuk mengganti dengan sistem baru didukung ORI DIY. "Jika ASPD dimaksudkan sebagai instrumen asesmen untuk melihat dan mengetahui mutu kegiatan, ya itu saja. Jangan dijadikan instrumen PPDB," ujar Budhi.

Apapun pengganti ASPD, lanjut Budhi, mestinya hanya untuk memetakan hasil pembelajaran siswa dan menjaga layanan pendidikan agar tak ada kesenjangan antar kabupaten/kota.

Tak Setuju

Kepala Diskdikpora Kulonprogo, Arif Prastowo berpendapat keberadaan ASPD merupakan hal baik untuk asesmen. ASPD dinilai dapat menilai kemampuan literasi, sains maupun numerasi dari peserta didik. "Memang itu diperlukan [ASPD]," ungkapnya. "Asesmen daerah mungkin juga masih dipandang perlu untuk melihat kemampuan siswa di regional DIY misalnya," ujarnya.

Bila dihapuskan, Arif mengungkapkan yang terpenting ada cara lain yang bisa untuk mengetahui situasi murid. Salah satu caranya menurut Arif adalah asesmen nasional.

Kepala Diskdikpora Bantul, Isdarmoko, mengaku belum bisa menentukan apa yang akan dilakukan setelah ASPD dihapus. Ia sebenarnya menyayangkan penghapusan ASPD. Menurutnya ASPD merupakan bagian dari merdeka belajar karena masing-masing daerah diberikan keleluasan untuk menentukan standar kelulusan dan kearifan lokal.

Senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati. "ASPD tidak hanya untuk standarisasi mutu pendidikan, tapi juga jadi cermat (cambuk) bagi para guru guna memotivasi anak-anak agar giat belajar," katanya. (David Nurriswan, 21/5/2023)
Harian Jogja, Utusan Pesisiran, & Citrus Dwi Jember

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005